

***ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN DIGITALIZATION AND
GOVERNMENT SUPPORT ON THE INCREASE OF ASSETS AND PROFIT OF
LPD***

**ANALISIS HUBUNGAN DAMPAK DIGITALISASI DAN DUKUNGAN
PEMERINTAH TERHADAP PENINGKATAN ASET DAN LABA LPD**

**Ni Komang Ayu Rismayanti¹, Putu Sukma Kurniawan², Gusti Ayu Ketut Rencana Sari
Dewi³**

Jurusan Ekonomi dan Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha^{1,2,3}

ayu.rismayanti@undiksha.ac.id¹

ABSTRACT

Village Credit Institutions (LPD) play an important role in strengthening rural economies, yet they continue to face challenges in financial management and performance improvement. This study examines the influence of Digitalization and Government Support on the improvement of profit and asset growth of LPDs in Kintamani District. Using a quantitative approach with a survey of LPD management, the data were analyzed using multiple linear regression. The results show that Digitalization has a positive effect on enhancing financial performance, while Government Support emerges as a more dominant factor in driving profit and asset growth. These findings highlight that the adoption of digital technology and active governmental involvement in guidance and supervision can strengthen efficiency, transparency, and sustainability in LPD financial management. Theoretically, this study supports the Resource-Based Theory, while practically it offers recommendations for LPDs to accelerate digital transformation and for local governments to enhance targeted assistance.

Keywords: Digitalization, Government Support, Village Credit Institutions (LPD), Assets and Profits,

ABSTRAK

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan lembaga penting dalam memperkuat perekonomian desa, namun masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan dan peningkatan kinerja keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Digitalisasi dan Dukungan Pemerintah terhadap peningkatan laba dan aset LPD di Kecamatan Kintamani. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif melalui survei terhadap pengurus LPD, dan data dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Digitalisasi memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kinerja keuangan LPD, sedangkan Dukungan Pemerintah menjadi faktor yang lebih dominan dalam mendorong pertumbuhan laba dan aset. Temuan ini menegaskan bahwa penerapan teknologi digital serta peran aktif pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan mampu memperkuat efisiensi, transparansi, dan keberlanjutan pengelolaan LPD. Secara teoritis, penelitian ini mendukung *Resource-Based Theory*, sementara secara praktis memberikan rekomendasi bagi LPD untuk mempercepat transformasi digital dan bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendampingan.

Kata Kunci: Digitalisasi, Dukungan Pemerintah, LPD, Laba Dan Aset

PENDAHULUAN

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan entitas komersial milik masyarakat adat Bali yang bergerak di bidang simpan pinjam dan berperan penting dalam mengelola perekonomian desa adat. LPD didirikan berdasarkan SK Gubernur Bali No. 972 Tahun 1984 dan diperkuat dengan Perda Bali No. 8 Tahun 2002 sebagai upaya memperkuat keuangan desa serta melindungi kemandirian adat (Sri dkk., 2023).

Keberadaan LPD berfungsi sebagai sarana ekonomi desa yang membantu masyarakat memperoleh modal usaha serta mendorong pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal (Handayani dkk., 2022). Selain itu, LPD juga berperan dalam menghapus praktik eksploitasi dalam hubungan kredit dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh warga desa untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Di Kabupaten Bangli, LPD menjadi lembaga keuangan mikro

berbasis adat yang tidak hanya menyediakan layanan keuangan, tetapi juga berfungsi sebagai penggerak pembangunan berbasis kearifan lokal,

dengan jumlah dan persebaran yang mencerminkan tingginya partisipasi masyarakat terhadap lembaga keuangan desa tersebut.

Tabel 1 Jumlah LPD di Kabupaten Bangli Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah	Rata-Rata Aset	Rata-Rata Laba
1	Bangli	23	15.064.916	401.748
2	Tembuku	36	13.958.781	310.938
3	Susut	39	14.145.873	260.022
4	Kintamani	61	9.583.078	244.226
Total		159		

(Sumber: LPLPD Kabupaten Bangli, 2025)

Berdasarkan data Tabel 1.1, jumlah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kabupaten Bangli tahun 2024 mencapai 159 unit yang tersebar di empat kecamatan, dengan Kecamatan Kintamani memiliki jumlah terbanyak yakni 61 LPD, disusul Kecamatan Susut sebanyak 39 LPD, Kecamatan Tembuku 36 LPD, dan Kecamatan Bangli 23 LPD. Tingginya jumlah LPD di Kintamani mencerminkan besarnya potensi ekonomi serta banyaknya desa adat di wilayah tersebut, namun secara kualitas kinerja keuangan, LPD di Kintamani memiliki rata-rata aset sebesar Rp9.583.078 dan laba sebesar Rp244.226, yang merupakan angka terendah dibandingkan kecamatan lainnya. Kondisi ini menandakan bahwa

meskipun jumlahnya dominan, sebagian besar LPD di Kintamani masih menghadapi permasalahan manajerial, kepatuhan terhadap prinsip tata kelola, serta akuntabilitas dan transparansi keuangan. Permasalahan tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat adat terhadap LPD, sehingga diperlukan evaluasi dan penguatan kapasitas kelembagaan untuk menjamin keberlanjutan dan efektivitas peran LPD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penilaian kesehatan LPD yang dilakukan oleh LPLPD menjadi penting untuk menggambarkan kondisi aktual dan menilai sejauh mana LPD di Kecamatan Kintamani mampu berfungsi secara optimal dan berkelanjutan.

Tabel 2. Data Kesehatan LPD di Kecamatan Kintamani 2022-2024

No	Kategori	2022	2023	2024
1	Sehat	39	38	32
2	Cukup Sehat	12	9	8
3	Kurang Sehat	4	8	3
4	Tidak Sehat	2	2	2
5	Macet	4	4	7
6	Tidak Setor Laporan	-	-	9
Total		61	61	61

(Sumber: LPLPD Kabupaten Bangli, 2025)

Berdasarkan data Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD) pada Tabel 2, jumlah LPD berstatus sehat di Kecamatan Kintamani mengalami penurunan dari 39 unit pada tahun 2022 menjadi 32 unit pada tahun 2024, yang mencerminkan

adanya penurunan kinerja dan tantangan dalam pengelolaan. Sementara itu, jumlah LPD yang masuk kategori macet meningkat dari 4 menjadi 7 unit, serta muncul 9 LPD yang tidak menyetor laporan, menunjukkan permasalahan serius dalam pelaporan dan tata kelola.

Kondisi ini berdampak pada aset dan laba LPD, sebagaimana penelitian Widiastuti dan Sudarma (2020) yang menunjukkan bahwa kesehatan LPD berpengaruh terhadap profitabilitas melalui pertumbuhan aset. Kasus penyimpangan di LPD Langgahan dan LPD Selulung, dengan kerugian mencapai miliaran rupiah akibat korupsi dan pengelolaan tidak transparan (Kompas, 2022; Radar Bali, 2022; NusaBali, 2024), serta permasalahan administrasi di LPD Desa Adat Pinggan (Warmadewa Journal, 2021), semakin memperburuk kepercayaan masyarakat dan stabilitas keuangan lembaga. Oleh karena itu, penguatan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas menjadi hal krusial bagi keberlanjutan LPD. Sebagai lembaga keuangan mikro berbasis adat, LPD memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian lokal dan menjaga kearifan tradisional, namun perlu beradaptasi dengan perkembangan global melalui digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akses layanan keuangan (Sari dkk., 2023).

Berdasarkan *Resource-Based Theory* (RBT), keunggulan kompetitif organisasi bergantung pada kemampuan dalam mengelola sumber daya strategisnya (Barney, 1991). Dalam konteks LPD, digitalisasi menjadi sumber daya penting yang mampu meningkatkan efisiensi, akurasi transaksi, serta kualitas layanan sehingga berdampak positif pada peningkatan aset dan laba. Dukungan pemerintah melalui regulasi, infrastruktur digital, pelatihan SDM, dan insentif turut memperkuat daya saing LPD di Kecamatan Kintamani. Digitalisasi, yang merupakan proses transformasi dari sistem analog menuju sistem digital (Wibowo dkk., 2023), memungkinkan pengelolaan keuangan

yang lebih modern melalui aplikasi pembukuan, toko daring, dan pembayaran digital (Anshari & Manjaleni, 2024). Implementasi sistem digital seperti di LPD Desa Adat Lukluk menunjukkan peningkatan transparansi dan kepercayaan publik. Hal ini sejalan dengan penelitian Ula (2023) yang menegaskan bahwa digitalisasi meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana dan efisiensi pelaporan keuangan desa. Selain mempercepat transaksi dan layanan keuangan, digitalisasi juga memperkuat tata kelola serta transparansi (Priyanto & Purwanto, 2022), dan terbukti meningkatkan kepuasan nasabah melalui sistem informasi digital dan *mobile banking* (Sukarta dkk., 2024). Penelitian lain menegaskan bahwa teknologi digital berkontribusi terhadap kinerja dan keberlanjutan LPD (Pratama & Widhiyanti, 2021), serta memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan (Kurniawan dkk., 2021) dan kinerja keuangan koperasi syariah (Fadhilah & Darmawati, 2023), meskipun ada temuan berbeda dari Kurniawati dkk. (2024) yang menyatakan bahwa digitalisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap laba. Dengan demikian, digitalisasi berperan strategis dalam memperkuat efisiensi operasional, transparansi, dan daya saing LPD tanpa mengabaikan nilai-nilai kearifan lokal sebagai fondasi utama keberlanjutan lembaga.

Dukungan pemerintah terhadap digitalisasi dan penguatan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) terlihat melalui berbagai kebijakan, program, dan regulasi yang difokuskan untuk meningkatkan efisiensi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Pemerintah menyediakan aplikasi, pelatihan, serta pendampingan bagi pengelola LPD agar mampu memanfaatkan teknologi informasi

secara optimal (Sari dkk., 2023). Sebagai lembaga keuangan berbasis adat, LPD mendapatkan dasar hukum melalui Perda Provinsi Bali No. 8 Tahun 2002 dan diperkuat dengan Perda No. 3 Tahun 2017, yang menegaskan peran pemerintah sebagai pengatur, pendukung, dan pengawas dalam pembinaan LPD (Sukandia, 2012). Melalui regulasi tersebut, pemerintah memberikan standar operasional, bantuan permodalan, dan fasilitasi teknologi untuk meningkatkan profesionalitas serta efisiensi layanan. Dukungan ini terbukti mendorong pertumbuhan aset dan laba LPD karena pengelolaan dana masyarakat menjadi lebih transparan dan kredibel, seiring meningkatnya kepercayaan publik terhadap lembaga. Secara empiris, penelitian Perdana et al. (2023) menunjukkan bahwa dukungan pemerintah berpengaruh terhadap pertumbuhan usaha, sementara Saputra dkk. (2019) menemukan pengaruh positif dukungan pemerintah terhadap pendapatan instansi daerah. Namun, temuan berbeda dikemukakan oleh Samira dkk. (2023) yang menyatakan bahwa dukungan pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja suatu usaha. Dengan demikian, efektivitas dukungan pemerintah terhadap kinerja LPD sangat bergantung pada implementasi kebijakan dan kapasitas lembaga dalam memanfaatkannya untuk memperkuat daya saing dan kesejahteraan masyarakat desa.

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan institusi keuangan mikro berbasis adat yang berperan strategis dalam menopang perekonomian masyarakat Bali, khususnya di Kabupaten Bangli. Meskipun jumlah LPD di Kecamatan Kintamani tergolong tinggi, yakni 61 unit pada tahun 2022, tidak semua menunjukkan kinerja sehat

karena masih terdapat LPD yang masuk kategori kurang sehat, tidak sehat, bahkan macet. Kondisi ini menandakan adanya persoalan mendasar dalam tata kelola, manajemen keuangan, dan akuntabilitas, sebagaimana terlihat dari kasus penyalahgunaan dana di LPD Langgahan dan LPD Selulung. Tantangan globalisasi dan transformasi digital semakin menuntut LPD untuk beradaptasi guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepercayaan masyarakat. Namun, penelitian terdahulu umumnya hanya menyoroti peran LPD secara umum tanpa menelaah secara mendalam penurunan kinerja keuangan dan status kesehatan lembaga tersebut. Masih terdapat celah penelitian dalam menganalisis secara komprehensif faktor-faktor yang memengaruhi menurunnya kesehatan LPD, termasuk efektivitas peran LPLPD sebagai pembina, serta hubungan antara menurunnya kepercayaan masyarakat dengan penurunan simpanan dan partisipasi keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji strategi penguatan kelembagaan, penerapan tata kelola yang baik, dan pemanfaatan digitalisasi dalam meningkatkan kesehatan dan kinerja LPD secara berkelanjutan berbasis kearifan lokal.

Perkembangan digitalisasi keuangan dan dukungan pemerintah terhadap transformasi ekonomi berbasis desa belum dimanfaatkan optimal oleh sebagian besar LPD. Meskipun pemerintah dan OJK telah mendorong sistem keuangan digital serta pengawasan berbasis teknologi, kesiapan LPD dalam merespons kebijakan ini masih minim, ditambah rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur, dan resistensi budaya. Padahal, penguatan LPD sangat penting bagi ketahanan ekonomi Bali yang rentan terhadap krisis pariwisata.

Penelitian ini menjadi krusial karena masih terbatasnya kajian yang menguji peran digitalisasi dan dukungan pemerintah terhadap kinerja keuangan LPD, khususnya pertumbuhan aset dan laba. Dengan menggunakan pendekatan *Resource-Based Theory (RBT)*, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana sinergi sumber daya internal dan eksternal dapat meningkatkan keunggulan kompetitif LPD. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berjudul “Analisis Hubungan Dampak Digitalisasi dan Dukungan Pemerintah terhadap Peningkatan Aset dan Laba LPD (Studi Kasus pada Lembaga Perkreditan Desa se-Kecamatan Kintamani)”.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan kausal yang bertujuan menguji pengaruh digitalisasi dan dukungan pemerintah terhadap peningkatan aset dan laba Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Kintamani, Bali. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik LPD yang aktif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, namun sebagian masih mengalami kondisi tidak sehat, sehingga relevan untuk dikaji. Penelitian berlangsung selama enam bulan, dari Februari hingga Agustus 2025, mencakup tahap persiapan, pengumpulan, dan analisis data. Studi ini berlandaskan *Resource-Based Theory (RBT)*, dengan mengintegrasikan digitalisasi sebagai sumber daya internal dan dukungan pemerintah sebagai sumber daya eksternal yang berpotensi memperkuat keunggulan kompetitif LPD. Populasi penelitian mencakup seluruh 61 LPD di Kecamatan Kintamani, dengan sampel sebanyak 45 LPD yang masih aktif beroperasi dan rutin menyetorkan laporan keuangan tahun 2022–2023. Teknik pengambilan

sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, dengan responden terdiri dari Ketua, Bendahara, dan Sekretaris LPD yang berjumlah total 135 orang. Ketiga posisi tersebut dipilih karena memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan, penerapan digitalisasi, serta hubungan dengan pemerintah, sehingga dinilai mampu memberikan informasi yang akurat dan relevan dalam menjawab tujuan penelitian ini.

Variabel dalam penelitian ini terdiri atas peningkatan aset dan laba (Y), digitalisasi (X1), serta dukungan pemerintah (X2), yang masing-masing dijabarkan melalui definisi operasional agar dapat diukur secara empiris. Peningkatan aset dan laba diartikan sebagai pertumbuhan sumber daya ekonomi dan keuntungan bersih yang mencerminkan kinerja keuangan LPD (Kieso dkk., 2019; Harahap, 2016), dengan indikator pengelolaan dana masyarakat, peningkatan laba, dan manajemen kegiatan operasional (Sujana dkk., 2018; Widhiastuti & W., 2022). Digitalisasi didefinisikan sebagai proses konversi aktivitas dan dokumen ke bentuk digital (Deegan, 2022), dengan indikator persepsi kemudahan penggunaan, persepsi manfaat, sikap penggunaan, perilaku untuk tetap menggunakan, dan kondisi sistem (Shidqi, 2023). Sementara itu, dukungan pemerintah mencakup bentuk bantuan, kebijakan, pembinaan, dan pengawasan yang diberikan untuk memperkuat keberhasilan lembaga (Priantara, 2019; Yabbar & Hamzah dalam Kurniawan dkk., 2019). Seluruh indikator diukur menggunakan skala ordinal dengan pendekatan skala Likert lima tingkat, mulai dari “sangat tidak setuju” hingga “sangat setuju,” guna menilai sejauh mana persepsi, sikap, dan pengalaman responden terhadap digitalisasi, dukungan pemerintah, serta kinerja

keuangan LPD. Penelitian ini menggunakan metode asosiatif kausal dengan pendekatan kuantitatif, memanfaatkan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada Ketua dan Bendahara LPD di Kecamatan Kintamani untuk menggali persepsi terkait digitalisasi, dukungan pemerintah, serta peningkatan aset dan laba. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti laporan LPLPD, jurnal, dan literatur daring. Analisis data dilakukan menggunakan aplikasi SPSS versi 25 dengan beberapa tahapan, yaitu uji statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data, uji validitas dan reliabilitas untuk memastikan kualitas instrumen, serta uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan

heteroskedastisitas guna memastikan kelayakan model regresi. Pengujian hipotesis dilakukan melalui analisis regresi linier berganda. Uji parsial (uji t) digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, sedangkan uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel independen mampu menjelaskan variasi variabel dependen dalam model penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Analisis Statistik Deskriptif

Hasil dari uji statistik deskripsi berkaitan dengan perolehan skor minimum, maksimum, standar deviasi hingga nilai rata-ratanya yang disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Digitalisasi (X1)	135	14,00	25,00	19,92	3,048
Dukungan Pemerintah (X2)	135	18,00	30,00	23,68	3,086
Peningkatan Laba dan Aset (Y)	135	19,00	30,00	23,98	2,878
Valid N (listwise)					

(Sumber: Data Primer diolah, 2025)

Berdasarkan Tabel 4.3, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat digitalisasi LPD di Kecamatan Kintamani tergolong baik dengan rata-rata skor 19,92, menandakan sebagian besar LPD telah menerapkan teknologi digital dalam operasionalnya secara relatif seragam. Dukungan pemerintah juga dinilai cukup tinggi dengan rata-rata 23,68, menunjukkan adanya fasilitasi melalui pelatihan, regulasi, dan kebijakan pendukung yang dirasakan konsisten di antara responden. Sementara itu, variabel peningkatan laba dan aset memiliki rata-rata 23,98, mengindikasikan tren positif terhadap kinerja keuangan LPD yang

kemungkinan besar dipengaruhi oleh penerapan digitalisasi dan dukungan pemerintah yang efektif.

Analisis Karakteristik Responden

Mayoritas responden penelitian ini berjenis kelamin laki-laki sebanyak 95 orang (70,37%) dan perempuan 40 orang (29,63%), menunjukkan dominasi laki-laki dalam pengelolaan LPD di Kecamatan Kintamani. Berdasarkan usia, sebagian besar berada pada rentang 41–50 tahun (39,26%) dan di atas 50 tahun (34,81%), menandakan bahwa pengelola LPD umumnya berada pada usia produktif matang dengan pengalaman yang luas namun berpotensi

menghadapi tantangan adaptasi teknologi. Dari segi pendidikan, mayoritas lulusan SMA (68,89%), sedangkan sisanya berpendidikan Diploma/Sarjana, SMP, dan SD, yang menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas literasi digital dan keuangan. Komposisi jabatan Ketua, Sekretaris, dan Bendahara masing-masing seimbang (33,33%), mencerminkan keterwakilan pandangan dari seluruh fungsi manajerial. Secara keseluruhan, profil ini menggambarkan bahwa LPD dikelola oleh sumber daya manusia berpengalaman dengan latar pendidikan menengah, yang menjadi faktor penting dalam proses penerimaan digitalisasi.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Berdasarkan hasil uji validitas seluruh item pertanyaan pada variabel Digitalisasi, Dukungan Pemerintah, dan Peningkatan Laba dan Aset memiliki nilai *Pearson's Correlation* lebih besar dari r tabel (0,170) dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga seluruh item dinyatakan valid dan mampu mengukur variabel yang dimaksud dengan baik. Selanjutnya, hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha di atas 0,70, yaitu Digitalisasi sebesar 0,838, Dukungan Pemerintah sebesar 0,785, dan Peningkatan Laba dan Aset sebesar 0,740. Dengan demikian, instrumen penelitian dinyatakan reliabel karena memiliki konsistensi internal yang tinggi dan dapat dipercaya untuk menghasilkan

data yang stabil serta akurat dalam pengukuran.

Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik, diperoleh bahwa model regresi dalam penelitian ini telah memenuhi seluruh asumsi dasar. Uji normalitas menggunakan grafik P-P Plot dan uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan data berdistribusi normal dengan nilai signifikansi $0,200 \geq 0,05$. Uji multikolinearitas menunjukkan bahwa variabel Digitalisasi dan Dukungan Pemerintah memiliki nilai tolerance $0,231 > 0,10$ dan VIF $4,331 < 10$, sehingga tidak terdapat korelasi berlebihan antar variabel independen. Selanjutnya, hasil uji heteroskedastisitas dengan metode Spearman Rho menunjukkan nilai signifikansi Digitalisasi sebesar 0,868 dan Dukungan Pemerintah sebesar 0,957, yang keduanya lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari gejala normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, sehingga layak digunakan untuk analisis regresi lanjutan.

Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil analisis regresi, dapat dipahami bagaimana garis regresi berinteraksi menggunakan analisis konstanta dan beta. Hasil pengujian konstanta dan koefisien beta dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4, Hasil Uji Hipotesis

Model		Coefficients ^a			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.886	.538		5.367	.000
	Digitalisasi (X1)	.126	.047	.134	2.670	.009
	Dukungan Pemerintah (X2)	.784	.047	.841	16.766	.000

a. Dependent Variable: Peningkatan Aset dan Laba (Y)

Sumber: Data Primer diolah, 2025

Berdasarkan pada Tabel 4.9, diperoleh bahwa nilai konstanta (α) sebesar 2,886, koefisien regresi Digitalisasi (β_1) sebesar 0,126, dan koefisien regresi Dukungan Pemerintah (β_2) sebesar 0,784. Dengan demikian, persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini dapat dituliskan sebagai berikut.

$$Y = 2,886 + 0,126 X_1 + 0,784 X_2 + e$$

Berdasarkan model regresi tersebut, adapun hasil interpretasi yakni sebagai berikut.

1. Nilai konstanta sebesar 2,886 dengan tingkat signifikansi 0,000 menunjukkan bahwa apabila variabel Digitalisasi dan Dukungan Pemerintah dianggap tidak ada atau bernilai nol, maka nilai Peningkatan Aset dan Laba diperkirakan sebesar 2,886. Secara praktis, nilai konstanta ini bukan untuk diinterpretasikan secara harfiah, melainkan sebagai penyesuaian matematis untuk memastikan model regresi mencerminkan hubungan antar variabel secara akurat.
2. Variabel Digitalisasi memiliki koefisien regresi sebesar 0,126 dengan signifikansi 0,009 (lebih kecil dari 0,05), yang menunjukkan bahwa pengaruhnya terhadap Peningkatan Aset dan Laba adalah positif dan signifikan. Artinya, setiap peningkatan satu satuan dalam penerapan digitalisasi akan meningkatkan skor Peningkatan Aset dan Laba sebesar 0,126 poin, dengan asumsi variabel lain tetap. Hal ini mencerminkan bahwa semakin tinggi penerapan teknologi digital pada LPD, seperti digitalisasi layanan, sistem informasi, dan pengelolaan keuangan, maka semakin besar kemungkinan peningkatan kinerja keuangan LPD.

3. Variabel Dukungan Pemerintah memiliki koefisien regresi sebesar 0,784 dengan signifikansi 0,000, yang berarti berpengaruh positif dan sangat signifikan terhadap Peningkatan Aset dan Laba. Artinya, setiap peningkatan satu satuan pada dukungan pemerintah akan meningkatkan skor Peningkatan Aset dan Laba sebesar 0,784 poin. Nilai koefisien ini menunjukkan bahwa dukungan pemerintah menjadi faktor dominan dalam model ini, misalnya melalui pelatihan, bantuan kebijakan, pendampingan, atau regulasi yang mendukung pengembangan LPD. Peran pemerintah terbukti memperkuat kinerja keuangan lembaga secara signifikan.

Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil Model Summary, diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,922, yang menunjukkan bahwa sebesar 92,2% variasi pada variabel Peningkatan Aset dan Laba (Y) dapat dijelaskan oleh dua variabel independen yaitu Digitalisasi (X_1) dan Dukungan Pemerintah (X_2) dalam model regresi ini. Dengan kata lain, model regresi ini memiliki kemampuan prediksi yang sangat kuat karena hampir seluruh perubahan pada variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independennya. Sementara itu, sisanya sebesar 7,8% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model, seperti kualitas sumber daya manusia, strategi manajemen, kondisi pasar, atau variabel eksternal lainnya yang tidak diteliti dalam studi ini. Nilai standar error of estimate sebesar 0,80321 menunjukkan tingkat kesalahan prediksi model yang relatif kecil, yang mengindikasikan bahwa hasil model regresi memiliki akurasi yang baik.

Pembahasan

Hubungan Digitalisasi Terhadap Peningkatan Laba dan Aset

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Digitalisasi mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap Peningkatan Laba dan Aset pada LPD di Kecamatan Kintamani. Hal ini terlihat dari nilai koefisien regresi sebesar 0,126 dengan tingkat signifikansi 0,009, yang lebih kecil dari ambang signifikansi 0,05. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat digitalisasi yang diterapkan oleh LPD, maka semakin besar potensi peningkatan aset dan laba yang dapat dicapai. Artinya, digitalisasi menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan efisiensi operasional, akurasi pengelolaan dana, dan pengambilan keputusan keuangan yang tepat di lingkungan LPD.

Dalam penelitian ini, Digitalisasi diukur melalui lima indikator utama, yaitu Persepsi Kemudahan Penggunaan, Persepsi Manfaat, Sikap Penggunaan, dan Kondisi Sistem. Indikator Persepsi Kemudahan Penggunaan tercermin dari kemampuan pengurus LPD dalam memahami dan mengoperasikan sistem digital secara mandiri, tanpa membutuhkan bantuan teknis yang intensif. Penerapan digitalisasi berperan dalam meningkatkan kecepatan dan efisiensi kerja, serta mengurangi kesalahan pencatatan dan keterlambatan pelaporan (Putra & Salsabila, 2025). Digitalisasi juga memungkinkan proses layanan menjadi lebih ringkas dan transparan, yang pada akhirnya berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana (Kusumawati dkk, 2025).

Pada indikator Persepsi Manfaat, penggunaan sistem digital terbukti mempercepat proses administrasi dan pelaporan keuangan. LPD yang telah menerapkan sistem berbasis teknologi cenderung memiliki laporan keuangan

yang lebih tepat waktu dan akurat, sehingga memudahkan dalam menyusun strategi usaha yang berorientasi pada pertumbuhan. Menurut Erawati (2022) pemanfaatan teknologi informasi mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan LPD. Dengan meningkatkan kualitas laporan keuangan mampu mendukung strategi usaha yang berorientasi pada pertumbuhan laba dari perusahaan karena seluruhnya tercermin dengan baik dalam laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan indikator peningkatan laba bahwa LPD menunjukkan tren peningkatan laba bersih dan menerapkan strategi yang menghasilkan keuntungan stabil. Selain itu, penggunaan sistem digital juga membantu mengurangi risiko kesalahan manusia (*human error*) yang sering terjadi pada pencatatan manual. Dengan demikian, manfaat digitalisasi tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek tetapi juga mampu meningkatkan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

Sikap penggunaan juga menjadi aspek penting, di mana pengurus LPD menunjukkan sikap positif terhadap penggunaan teknologi. Sikap ini menunjukkan adanya kesiapan mental dan budaya kerja yang terbuka terhadap inovasi, yang sejalan dengan indikator manajemen kegiatan operasional tentang efisiensi manajemen operasional. Ketika pengurus merasa nyaman dengan teknologi, maka penerapan sistem digital dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Menurut Saepulloh & Susila (2021) menyatakan bahwa inovasi digital yang berhasil di organisasi bergantung pada sejauh mana SDM-nya mampu menyerap, mengadopsi, dan mengembangkan teknologi yang relevan. Organisasi yang mendorong pelatihan berkelanjutan dan pembelajaran lintas fungsi akan lebih siap dalam menghadapi disrupsi digital

dan menjaga keunggulan bersaing. Hal ini menegaskan bahwa perubahan teknologi tidak hanya membutuhkan perangkat keras dan lunak, tetapi juga kesiapan sikap dan pola pikir dari pengurus. Dengan sikap positif tersebut, proses adaptasi terhadap perkembangan digital dapat dilakukan dengan lebih cepat dan minim hambatan.

Sementara itu, indikator Kondisi Sistem menggambarkan bahwa sistem digital yang digunakan oleh LPD memiliki kecepatan dan keandalan yang baik. Keunggulan sistem ini menjadi keunggulan kompetitif internal yang penting, karena memengaruhi kelancaran operasional harian dan kemampuan manajemen untuk merespons kebutuhan pasar dengan cepat dan tepat. Perkembangan teknologi digital menuntut organisasi untuk memiliki sistem yang tidak hanya canggih, tetapi juga mampu bekerja secara cepat dan andal. Sistem yang responsif akan mendukung kelancaran operasional serta memudahkan manajemen dalam mengambil keputusan secara tepat waktu, sehingga berdampak pada peningkatan kinerja organisasi. Bahwa kualitas sistem yang tinggi (termasuk kecepatan dan keandalan) berkontribusi secara langsung terhadap kepuasan pengguna (Abdullah dkk, 2024). Selain mendukung efisiensi, sistem yang andal juga memberikan rasa aman bagi pengurus dan nasabah karena data keuangan tersimpan dengan baik. Dengan demikian, kondisi sistem yang prima menjadi fondasi utama dalam menciptakan kepercayaan dan keberlanjutan operasional LPD.

Temuan ini sejalan dengan *Resource-Based Theory*, di mana teknologi informasi yang dimiliki dan dikelola secara efektif menjadi sumber daya strategis untuk mencapai keunggulan kompetitif. Barney (1991) menekankan bahwa sumber daya yang

bersifat valuable, rare, inimitable, dan non-substitutable akan memberikan keunggulan yang berkelanjutan bagi organisasi. Dalam konteks ini, digitalisasi menjadi sumber daya internal yang berharga dan tidak mudah ditiru, yang mendorong efisiensi dan inovasi dalam pengelolaan LPD. Hal ini didukung oleh pandangan Indrajaya dan Artini (2020), bahwa penerapan sistem digital yang terstruktur dapat mempercepat proses manajerial dan akuntansi, serta meningkatkan kinerja keuangan secara signifikan.

Temuan dalam penelitian ini mendukung temuan penelitian oleh Kurniawan dkk. (2021) menunjukkan bahwa transformasi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Selanjutnya, Fadhilah dan Darmawati (2023) juga menemukan bahwa digitalisasi layanan memberikan dampak besar terhadap peningkatan kinerja keuangan koperasi syariah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Digitalisasi merupakan sumber daya internal yang berperan krusial dalam mempercepat peningkatan aset dan laba pada LPD. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi peningkatan kapasitas SDM dalam bidang teknologi, penguatan infrastruktur digital, dan dukungan berkelanjutan dari pemerintah daerah agar sistem digital yang diterapkan tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar menjadi alat penggerak utama dalam pengelolaan keuangan LPD yang efektif, efisien, dan transparan.

Hubungan Dukungan Pemerintah Terhadap Peningkatan Laba dan Aset

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dukungan Pemerintah mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap Peningkatan Laba dan Aset pada LPD di Kecamatan Kintamani. Hal ini terbukti dari nilai

koefisien regresi sebesar 0,784 dengan tingkat signifikansi 0,000, yang jauh di bawah ambang batas 0,05. Angka ini menunjukkan bahwa dukungan pemerintah memiliki kontribusi yang paling dominan dalam model penelitian ini. Artinya, semakin kuat dan berkelanjutan dukungan yang diberikan oleh pemerintah kepada LPD, maka semakin besar pula potensi pertumbuhan aset dan peningkatan laba lembaga tersebut secara menyeluruh.

Dalam penelitian ini, Dukungan Pemerintah diukur melalui tiga dimensi utama, yaitu Pendampingan, Pembinaan, dan Pengawasan. Pertama, aspek pendampingan terlihat dari bantuan teknis dan arahan strategis yang diberikan pemerintah kepada pengurus LPD. Pendampingan ini membantu pengurus dalam mengelola dana masyarakat secara lebih optimal dan transparan, yang menjadi dasar utama dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga (Shonhadji dkk, 2024). Pengelolaan dana yang transparan pada akhirnya berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan aset LPD, karena semakin banyak masyarakat yang mempercayakan dananya untuk dikelola. Selain itu, pendampingan juga berperan sebagai sarana transfer pengetahuan dari regulator kepada pengurus, sehingga tercipta keselarasan visi dalam pengelolaan keuangan lembaga. Dengan adanya sinergi tersebut, LPD mampu bergerak lebih adaptif dalam menghadapi dinamika ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya, pembinaan dari pemerintah mencakup penyediaan pelatihan dan bimbingan teknis yang bertujuan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di LPD. Melalui pelatihan yang relevan, pengurus LPD dibekali pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menyusun

strategi keuangan, mengelola risiko usaha, dan menjalankan inovasi layanan. Hal ini secara nyata berdampak pada meningkatnya laba bersih dari tahun ke tahun, karena strategi yang diterapkan menjadi lebih efektif dan mampu menciptakan stabilitas keuntungan dalam jangka panjang. Pengembangan SDM dapat dilakukan melalui pelatihan, pendidikan, dan pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri, selain itu pemanfaatan teknologi digital menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi perusahaan (Mariati dkk, 2025). Dengan pembinaan yang berkesinambungan, pengurus LPD tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis, tetapi juga membangun kepercayaan diri dalam mengambil keputusan strategis. Dampaknya, LPD menjadi lebih kompetitif dan mampu menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Adapun pengawasan berfungsi sebagai kontrol sistemik terhadap operasional dan kinerja keuangan LPD. Pemerintah secara aktif memantau jalannya tata kelola lembaga dan memberikan evaluasi yang bersifat membangun. Kehadiran pengawasan ini membuat LPD terdorong untuk menjalankan operasional secara efisien dan akuntabel. Efisiensi operasional yang terjaga dengan baik berkontribusi besar terhadap pertumbuhan kinerja keuangan lembaga secara berkelanjutan, termasuk dalam hal pertumbuhan aset dan laba. Pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai kontrol risiko, tetapi juga sebagai instrumen fundamental untuk membentuk tata kelola yang efektif, terstruktur, dan akuntabel (Yemima dkk, 2024). Dengan kata lain, peran pemerintah dalam fungsi kontrol bukan hanya mencegah kesalahan, tetapi juga menciptakan tata kelola yang disiplin dan terstruktur. Selain menjaga

akuntabilitas, pengawasan juga mendorong terciptanya inovasi kebijakan internal yang selaras dengan regulasi pemerintah. Hal ini memastikan bahwa LPD mampu mempertahankan reputasi positif sekaligus meningkatkan daya tarik bagi masyarakat sebagai lembaga keuangan lokal.

Temuan ini menguatkan pandangan dalam *Resource-Based Theory (RBT)*, yang menyatakan bahwa keunggulan organisasi sangat dipengaruhi oleh bagaimana organisasi tersebut mengelola dan mengembangkan sumber dayanya. Dalam hal ini, dukungan pemerintah berfungsi sebagai sumber daya eksternal yang bernilai strategis, yang memperkuat kemampuan internal LPD untuk mencapai tujuan keuangannya. Menurut Barney (1991), dukungan yang memiliki nilai, jarang dimiliki pihak lain, sulit ditiru, dan tidak tergantikan, akan memberi kontribusi terhadap keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Dukungan pemerintah, seperti pelatihan, pendampingan, dan pengawasan aktif, merupakan bentuk nyata dari sumber daya tersebut.

Temuan dalam penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Perdana dkk. (2023) menunjukkan bahwa dukungan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan usaha kewirausahaan, sementara Saputra dkk. (2019) menemukan bahwa dukungan pemerintah daerah mampu meningkatkan pendapatan instansi. Lebih lanjut, fenomena rendahnya pelaporan keuangan LPD yang tidak disetor sebagaimana dikemukakan dalam latar belakang penelitian menunjukkan bahwa tanpa adanya dukungan dan kontrol dari pemerintah, banyak LPD yang berisiko mengalami penurunan kinerja dan kehilangan kepercayaan masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dukungan pemerintah berperan penting dalam menciptakan lingkungan operasional yang sehat, disiplin, dan inovatif bagi LPD. Oleh karena itu, intervensi kebijakan yang bersifat jangka panjang sangat diperlukan, seperti pelatihan berbasis kebutuhan lokal, penguatan sistem monitoring keuangan, serta penerapan teknologi dalam pelaporan dan evaluasi. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa dukungan ini merata hingga ke LPD kecil yang berada di daerah pinggiran, agar tercipta pertumbuhan aset dan laba yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kecamatan Kintamani.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, adapun yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Digitalisasi mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap Peningkatan Laba dan Aset pada LPD di Kecamatan Kintamani. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat penerapan sistem digital dalam operasional LPD, seperti kemudahan penggunaan, efisiensi kerja, dan keandalan sistem, maka semakin besar pula kemampuan LPD dalam mengelola dana masyarakat secara optimal, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat posisi keuangannya. Digitalisasi menjadi elemen penting dalam mempercepat proses layanan, transparansi pelaporan, serta peningkatan kinerja keuangan secara keseluruhan.
2. Dukungan Pemerintah juga mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap Peningkatan Laba dan Aset. Artinya, semakin kuat peran

pemerintah dalam memberikan pendampingan, pelatihan, dan pengawasan terhadap pengelolaan LPD, maka semakin baik pula tata kelola, profesionalisme pengurus, dan akuntabilitas lembaga. Dukungan ini menciptakan lingkungan kerja yang lebih terstruktur, mendorong inovasi, dan membantu LPD dalam menyusun strategi keuangan yang efektif dan berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk Pengurus LPD di Kecamatan Kintamani

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa digitalisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan laba dan aset, maka pengurus LPD di Kecamatan Kintamani disarankan untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital dalam seluruh aspek operasional. Pengurus perlu memperkuat infrastruktur digital yang mendukung pelayanan berbasis sistem informasi, termasuk penggunaan *software* pencatatan keuangan, sistem manajemen kas, serta pelayanan nasabah berbasis aplikasi atau web. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM dalam bidang teknologi informasi sangat penting, melalui pelatihan teknis secara rutin agar seluruh staf mampu mengoperasikan sistem digital secara mandiri dan efisien. Pengurus juga disarankan untuk membentuk tim khusus digitalisasi internal yang bertugas mengawasi dan mengembangkan inisiatif transformasi digital, sehingga proses adaptasi terhadap perubahan teknologi dapat berjalan lebih sistematis dan berkelanjutan. Penguatan praktik manajemen keuangan berbasis digital

akan mendorong transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas lembaga secara menyeluruh.

2. Untuk Pemerintah Daerah dan Dinas Terkait

Mengacu pada temuan bahwa dukungan pemerintah merupakan faktor yang sangat dominan dalam memengaruhi peningkatan aset dan laba LPD, maka Pemerintah Daerah, khususnya melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, diharapkan memperluas cakupan dan efektivitas program pendampingan, pelatihan, dan pengawasan LPD secara terstruktur dan berkelanjutan. Pendampingan teknis tidak hanya perlu dilakukan pada saat pembentukan LPD, tetapi juga secara berkala dalam bentuk mentoring strategi usaha, pelaporan keuangan, dan inovasi layanan. Pemerintah juga disarankan untuk membentuk unit khusus atau memperkuat kelembagaan pengawasan dan evaluasi kinerja LPD, yang dilengkapi dengan sistem informasi berbasis digital untuk memantau kondisi keuangan dan tata kelola LPD secara real-time. Selain itu, kolaborasi dengan perguruan tinggi, praktisi keuangan desa, dan pengembang teknologi juga dapat difasilitasi untuk mendorong inovasi LPD yang adaptif terhadap tantangan ekonomi lokal. Dengan kebijakan yang responsif dan terarah, LPD akan mampu bertransformasi menjadi lembaga keuangan yang kompetitif dan berkelanjutan.

3. Untuk Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini berfokus pada pengaruh digitalisasi dan dukungan pemerintah terhadap peningkatan laba dan aset LPD di Kecamatan Kintamani dengan pendekatan kuantitatif. Untuk pengembangan ke depan, peneliti selanjutnya disarankan untuk menggali lebih dalam aspek perilaku pengurus

atau budaya organisasi LPD yang mungkin turut memengaruhi efektivitas digitalisasi dan dukungan eksternal, misalnya dengan pendekatan kualitatif atau *mix-method*. Penambahan variabel seperti literasi keuangan digital, kualitas SDM, inovasi produk, etika kepemimpinan, atau partisipasi masyarakat adat dalam tata kelola LPD juga dapat memperkaya pemahaman teoritis dan kontekstual terhadap dinamika lembaga keuangan berbasis lokal. Selain itu, penelitian lebih lanjut juga dapat diperluas pada LPD di kabupaten lain di Bali agar hasilnya dapat dibandingkan lintas wilayah, sehingga rekomendasi yang dihasilkan lebih komprehensif dan aplikatif secara regional. Dengan demikian, hasil penelitian ke depan dapat memberikan kontribusi lebih luas terhadap pengembangan teori dan praktik penguatan kelembagaan ekonomi desa berbasis kearifan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, D. A., Khidir, H. A., Maolood, I. Y., Ameen, A. K., Hamad, D. R., Beitolahi, H. S., ... & Shakor, M. Y. (2024). Elevating Information System Performance: A Deep Dive into Quality Metrics. *arXiv preprint arXiv:2412.18512*.
- Anshari, M. I., & Manjaleni, R. (2024). Pengaruh Digitalisasi Terhadap Efisiensi dan Efektivitas Proses Akuntansi Pada Koperasi Pesantren. *Journal of Economics and Accounting*, 5(1), 51–58. <https://doi.org/10.47065/arbitras.e.v5i1.2036>
- Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. *Journal of Management*, 17(1), 99–120.
- Erawati, N. P. D. (2022). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Penerapan Standar Akuntansi, Budaya Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan LPD di Kota Denpasar. (Tesis, Universitas Mahasaraswati Denpasar).
- Fadhilah, N. (2023). Transformasi Digital: Meningkatkan Kinerja Keuangan Koperasi Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6(2), 532–544.
- Handayani, N. M. D., Ustriyana, I. N. G., & Dewi, N. L. P. K. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Blahkiuh Kabupaten Badung. *Jurnal Agribisnis dan Agrowisata (Journal of Agribusiness and Agritourism)*, 11(1), 167.
- Kompas. (2022). Eks Bendahara LPD di Bali Diduga Korupsi Rp 2,7 Miliar, Sebagian Dihabiskan untuk Tajen. Diakses dari: <https://denpasar.kompas.com/read/2022/06/16/073102078/eks-bendahara-lpd-di-bali-diduga-korupsi-rp-19-miliar-sebagian-dihabiskan>
- Kurniawan, A., Rahayu, A., & Wibowo, L. A. (2021). Pengaruh Transformasi Digital Terhadap Kinerja Bank Pembangunan Daerah Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Keuangan dan Perbankan (JIKA)*, 10(2), 158–181.
- Kurniawati, R., Alrasyid, H., & Hardaningtyas, R. T. (2024). Pengaruh Digitalisasi Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2019–2023. *Jurnal Warta Ekonomi*, 7(01).
- Kusumawati, N., Lestari, D. M., & Sari, G. I. (2025). Studi Fenomenologi Digitalisasi dan Akuntabilitas Digital Keuangan Desa.

- Akuntanografi: Journal of Accounting Research, 1(1), 1–15.
- Mariati, N. P. A. M., Kumalasari, P. D., & Dewi, N. L. P. S. (2025). Pentingnya Intellectual Capital dan Corporate Governance pada Lembaga Perkreditan Desa. *Uwais Inspirasi Indonesia*.
- NusaBali. (2024). Kasus Dugaan Korupsi LPD Selulung, Kerugian Awal Tercatat Rp 1 Miliar Lebih. Diakses dari: <https://www.nusabali.com/berita/165024/kasus-dugaan-korupsi-lpd-selulung-kerugian-awal-tercatat-rp-1-milair-lebih>
- Perdana, M. A. C., Sihombing, T. M., Chrisinta, D., Sahala, J., & Budaya, I. (2023). Pengaruh dukungan pemerintah, infrastruktur, dan akses pasar terhadap pertumbuhan usaha kewirausahaan di wilayah perkotaan. *Sanskara Ekonomi dan Kewirausahaan*, 1(03), 149–161.
- Pratama & Widhiyani. (2021). The Effect of the Effectiveness of Accounting Information Systems on LPD Performance. *Asian Journal of Humanities and Social Sciences Research*.
- Prianthara, I. B. T. (2019). *Sistem Akuntansi LPD*. Denpasar: CV. Setia Bakti.
- Priyanto, I. M. D., & Purwanto, I. W. N. (2022). Implementation of Credit Granting by a Customary Village Credit Institution to Other Krama Without an Agreement of Cooperation Between Customary Villages. *International Journal of Innovative Technologies in Social Science*.
- Putra, I. H., & Salsabila, N. (2025). Pengelolaan Kas pada Program Studi Komputerisasi Akuntansi. *Jurnal Digitalisasi Akuntansi*, 2(2), 6–6.
- Radar Bali. (2022). 9 Tahun Tilep Dana Miliaran, Bendahara LPD Langgahan Dijebloskan ke Bui. Diakses dari: <https://radarbali.jawapos.com/hukum-kriminal/70860571/9-tahun-tilep-dana-miliaran-bendahara-lpd-langgahan-dijebloskan-ke-bui>
- Saepulloh, A., & Susila, E. (2021). Analisis Entrepreneur Leadership dan Digital Inovasi terhadap Keunggulan Bersaing dan Dampaknya pada Kinerja Organisasi dalam Menghadapi Industri 4.0. *Revitalisasi*, 10(1), 39.
- Saputra, K. A. K., Jayawarsa, A. K., & Anggiriawan, P. B. (2019). Dukungan pemerintah daerah, optimalisasi aset dan profesionalisme untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga*, 4(1), 607–622.
- Sari, R. P., Lutfia, C., & Soemarsono, P. N. (2023). Pengelolaan Keuangan Bumdes di Era Digital Melalui Manajemen Sumber Daya Manusia. *JEMB-Jurnal Ekonomi*, 2(1), 18–35.
- Shonhadji, N., Yulianti, E., Samekto, A., Nasution, Z., & Djunaedi, A. Z. (2024). Penyusunan Laporan Keuangan Masjid Menuju Akuntabilitas dan Transparansi. *Mopolayio: Jurnal Pengabdian Ekonomi*, 4(1), 32–41.
- Sri, A. N., Gorda, R., Ayu, I., Martni, O., Tini, A., & Gorda, R. (2023). Peran Lembaga Perkreditan Desa Dalam Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Akibat Covid-19 Desa Gelgel. *Community Development*

- Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4(3), 6359–6364. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/16705>
- Sukandia. (2012). Kedudukan Hukum dan Fungsi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai Lembaga Perekonomian Komunitas dalam Masyarakat Hukum Adat di Bali. Disertasi, Universitas Brawijaya.
- Sukarta, M. A. P., Setyastri, N. L. P., & Darmayasa, I. N. (2024). Pendampingan Transformasi Digital LPD Desa Adat Sesandan. *Madaniya*, 5(3), 756–763.
- Ula, I. S. (2023). Pengaruh Digitalisasi, Transparansi dan Kompetensi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Kabupaten Pati) [Universitas Islam Sultan Agung Fakultas].
- Warmadewa Journal. (2021). Pendampingan Penyusunan Perjanjian Kredit Pada LPD Desa Adat Pinggan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. Diakses dari: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/csj/article/view/876>
- Widiastuti, N. M. A., & Sudarma, M. (2020). Pengaruh Kesehatan LPD, Jumlah Nasabah dan Suku Bunga terhadap Profitabilitas dengan Pertumbuhan Aset sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 3(2), 130–150.
- Yemima, P. A., Pakpahan, E. Y., Fauzan, M. M., Adianto, T. O., & Darmawan, I. (2024). Analisis efektivitas pengawasan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Kabupaten Pangandaran. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 1(3), 298–307.